



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan dengan, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 92), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 78), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBARANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kelompok Jabatan Fungsional				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	7	-7
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Perisalah Legislatif Ahli Madya	11	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	2	-2

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	1	3	-2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1	5	-4
Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	4	5	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	0	2	-2
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	5	-4
Pengelola Siaran	6	3	3	0
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pegelola Keprotokolan	6	0	3	-3
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	5	9	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	4	-3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	0	3	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Operator Operasional Layanan	5	1	5	-4
Operator Operasional Layanan	3	0	10	-10
Operator Operasional Layanan	1	0	8	-8

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengelola Operasional Layanan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Operator Operasional Layanan	3	0	2	-2

Kelas 14				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	14	0	0	0

Kelas 14				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Kelas 14	1	1	0	0
Kelas 13	0	0	0	0
Kelas 12	0	10	-10	
Kelas 11	4	7	-3	
Kelas 10	6	8	-2	
Kelas 9	5	10	-5	
Kelas 8	4	18	-14	
Kelas 7	10	30	-20	
Kelas 6	7	22	-15	
Kelas 5	5	9	-4	
Kelas 3	0	12	-12	
Kelas 1	0	8	-8	
Jumlah	42	135	-93	

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	1	3	-2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1	5	-4
Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	4	5	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	0	2	-2
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	5	-4
Pengelola Siaran	6	3	3	0
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pegelola Keprotokolan	6	0	3	-3
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	5	9	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	4	-3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	0	3	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kelas 11				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	1	3	-2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	0	3	-3
Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1	5	-4
Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	4	5	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	0	3	-3
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	0	2	-2
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	5	-4
Pengelola Siaran	6	3	3	0
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pegelola Keprotokolan	6	0	3	-3
Dokumentalis Hukum	6	0	1	-1

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	2	-2
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	2	-2
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	3	-2
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Operator Operasional Layanan	5	1	5	-4
Operator Operasional Layanan	3	0	10	-10
Operator Operasional Layanan	1	0	8	-8

Kelas 9				
NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Kebijakan Teknis	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengelola Operasional Layanan	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Operator Operasional Layanan	3	0	2	-2

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGANADITOMO HERLABANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

Keterangan :

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S : Selisih